

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2008, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bahsan, M, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harsono Budi, 2013, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta.

HS H. Salim, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahmud, Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muljadi Kartini dan Gunawan Widaja, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*, Kencana Prenada, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

- Remi, Sutan Sjahdeini, 1999 , *Hak Tanggungn : Asas-Asas, Ketentuang-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung.
- S.W. Sumardjono, Maria, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Satrio, J, Hukum Jaminan, 1997, *Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1998, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedhendro, Kartini, 2001, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susila M. Endriyo et al, 2007 *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
- Suteki, Galang Taufani, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, teori dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tina Masriani, Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Udanti Trisadini P et al, 2013, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Revka Putra Media, Surabaya.
- Usman, Rachmadi, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Desertasi

Aminie, Norlita, “Akibat Hukum Terhadap Keterlambatan Pendaftaran APHT oleh PPAT ke Kantor Pertanahan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2008.

Dewi, IGA Gangga Santi, dan Mira Novana, “Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali)”, *Law, Development & Justice Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2020.

Gunarta, I Made Dwi, Akur Nurasa, dan Sukmo Pimuji, “Persepsi Kreditor dan PPAT terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik”, *Jurnal Tunas Agraria*, Volume. 3, Nomor 3, September 2020.

Imanda, Nadia, “Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Menteri Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik”, *Jurnal Notarie*, Vol. 3 No.1, Februari 2020.

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Nadira, Nurul, “Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik yang Akan Mulai Dilaksanakan Di Badan Pertanahan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor. II, November 2019.

Pandam Nurwulan, “Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.1 Vol. 28, Januari 2021.

Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Rizka Muthiadina, “Kedudukan Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang Telah Disampaikan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Bentuk Dokumen Elektronik Yang Tidak Diikuti Oleh Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL) Oleh Kreditor”,

Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.

Widya Astuti, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Terlambat Atau Tidak Melaksanakan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Telah Dibuatnya, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, Berita Negara tahun 2020 Nomor 349.